

PEMERTAHANAN BAHASA IBU DI PROVINSI PAPUA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL*

Supriyanto Widodo

Abstract

There are many languages in Papua Province and Papua Barat Province that they use as mother languages as vernacular. Nowadays, part of them in dangerous of their live and may be not sustain in many year to go. This can be happen because of many factors. The factor may be come from their own language, may be come from extra language. their attitudes of their own langage is not positive, and this is can increase speed to die.

We can decrease their to die with many strategic steps, such as the language as a lesson in the school. But, this is not easy to do, because many constrains may be we meet, such as the teacher not available, and many devices that can use in the classroom is not ready.

Kata-kata Kunci: bahasa ibu, pemertahanan, pendidikan formal

1. Penjelasan Beberapa Pengertian

Beberapa pengertian yang harus dijelaskan di sini adalah pengertian tentang pemertahanan bahasa atau pemeliharaan bahasa, pengertian tentang bahasa ibu, dan pengertian pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan pemertahanan bahasa atau pemeliharaan bahasa (*language maintenance*) adalah usaha agar suatu bahasa tetap dipakai dan dihargai, terutama sebagai identitas kelompok, dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan melalui pengajaran, kesusastraan, media massa, dan lain-lain (Kridalaksana, 2008:178). Pemertahanan suatu bahasa sebenarnya adalah konsekuensi dari sebuah pilihan yang dilakukan oleh suatu kelompok pemakai bahasa. Dalam pemertahanan bahasa, guyup (kelompok) itu secara kolektif menentukan untuk melanjutkan memakai bahasa yang sudah biasa dipakai (Sumarsono dan Paina Partana, 2002:231). Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat yang dwibahasa. Kedwibahasaan timbul akibat berbagai hal. Kedwibahasaan dapat timbul, antara lain akibat kehadiran kelompok pemakai bahasa lain, penerapan aturan terhadap kelompok tersebut, dan keinginan kelompok tersebut untuk menguasai bahasa lain.

Yang dimaksud dengan bahasa ibu (*native language, mother language*) adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak awal hidupnya melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, terutama dengan keluarga dekatnya (Kridalaksana, 2008:26). Sementara ini, untuk kasus di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah di

* Tulisan ini merupakan materi yang disampaikan pada acara *Dialog Dua Arah Papua TV* yang ditayangkan pada tanggal 11 Juni 2009 pukul 20.00-21.00 WIT.

Papua, yang merupakan bahasa ibu adalah bahasa daerah. Menurut Kridalaksana (2008: 25) yang dimaksud dengan bahasa daerah (*vernacular*) adalah bahasa yang dipergunakan penduduk asli suatu daerah, biasanya dalam wilayah yang multilingual. Bahasa daerah ini biasanya dipertentangkan dengan *bahasa persatuan*, *bahasa nasional*, atau *lingua franca*.

Sebelum menjelaskan pengertian pendidikan formal ada baiknya kalau dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang pendidikan. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (KBBI, 2005:263). Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan yang berjenjang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

2. Situasi Kebahasaan di Tanah Papua

Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terdapat beratus-ratus bahasa daerah yang sekaligus sebagai bahasa ibu. Di beberapa kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, menurut pengamatan saya, kini bahasa-bahasa daerah tersebut tidak lagi sebagai bahasa ibu. Memang, beberapa tahun yang lalu hampir setiap kampung/desa mempunyai bahasa daerah tersendiri yang sekaligus sebagai bahasa ibu. Namun, fungsi tersebut kini telah digantikan oleh bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa beratus-ratus bahasa daerah tersebut, jumlah penuturnya tidak sama. Bahasa daerah yang paling besar jumlah penuturnya adalah bahasa Dani, yakni ± 229.000 (Silzer 1986:15). Berdasarkan beberapa informasi, pada tahun 1996 penutur bahasa Dani berjumlah ± 270.000 orang. Berdasarkan beberapa sumber informasi juga, pada tahun 1996 bahasa Sentani, misalnya jumlah penuturnya ± 30.000 orang. Bahasa daerah dengan jumlah penutur kurang dari 1.000 sebanyak 143 bahasa, sedangkan bahasa daerah dengan jumlah penutur antara 1.000 – 5.000 sebanyak 61 bahasa. Bahasa-bahasa daerah dengan jumlah penutur kurang dari 1.000 orang jauh lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan bahasa daerah dengan jumlah penutur di atas 1.000 orang. Tentu saja jumlah-jumlah ini dalam kurun waktu beberapa dekade ini mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berarti bertambah jumlah penuturnya dan dapat pula berkurang jumlah penuturnya. Apabila jumlah penuturnya berkurang berarti keadaan ini sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan bahasa-bahasa daerah tersebut. Informasi yang kami peroleh di lapangan, beberapa tahun terakhir ini Pusat Bahasa dan Balai Bahasa Jayapura turun ke lapangan untuk mengumpulkan data, ternyata, ada satu bahasa daerah, pada tahun 2007 lalu penutur aktifnya tinggal tiga orang saja, yakni bahasa Dusner dan bahasa Tandia tinggal satu orang saja yang dapat berbahasa Tandia, itupun sudah tidak menguasai dengan baik, keduanya berada di Teluk Wondama. Bahasa-bahasa ini dapat dikatakan sudah punah. Satu lagi bahasa yang penuturnya tinggal satu orang saja, yakni bahasa Saponi di Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen.

Kuat lemahnya suatu bahasa daerah/ibu, antara lain ditentukan oleh besar kecilnya jumlah penutur, perannya sebagai sarana pendukung utama kebudayaan kelompok etnis yang bersangkutan, dan perannya sebagai alat komunikasi secara tertulis (lihat Alwi 2000:67). Oleh karena itu, kemantapan suatu bahasa daerah dapat diamati dari:

- 1) jumlah penuturnya,
- 2) budaya atau tradisi tulis masyarakat penuturnya,

- 3) pemakaiannya dalam bidang pendidikan,
- 4) perannya sebagai sarana pendukung kebudayaan daerah yang bersangkutan, dan
- 5) perannya sebagai alat komunikasi dan ekspresi. Ditinjau dari hal-hal di atas, tampaknya sebagian besar bahasa-bahasa daerah di Papua merupakan bahasa yang lemah.

Mengingat kondisi seperti ini, sudah selayaknya pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, turut campur dalam upaya pemertahanannya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan suatu bahasa ibu/daerah, salah satunya melalui pendidikan formal. Di dalam pendidikan formal ini, bahasa ibu/daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar atau dapat pula dipakai sebagai mata pelajaran.

Kita semua mengetahui bahwa di dalam bahasa daerah/ibu tersimpan nilai-nilai luhur pemilik bahasa tersebut. Di dalam bahasa daerah/ibu tersimpan budaya daerah peninggalan nenek moyang kita. Di dalam bahasa daerah/ibu pula kita dapat mengekspresikan diri. Semua itu kita mengetahui, tetapi akhir-akhir ini menurut pengamatan saya, kita tidak terlalu memperhatikan bahasa ibu/daerah kita. Kita tidak peduli terhadap bahasa ibu atau bahasa daerah kita.

3. Dasar Hukum

Ada beberapa produk hukum yang dapat dipakai oleh pemerintah sebagai dasar untuk bertindak mempertahankan/memelihara/melestarikan bahasa ibu/daerah. Produk-produk hukum itu, antara lain:

- UUD 1945 Bab XV, Pasal 36 beserta penjelasannya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

Dari segi peraturan sebenarnya sudah sangat kuat dasar yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk bertindak menangani bahasa ibu/daerah. Memang, tugas melestarikan dan mengembangkan bahasa ibu/daerah bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan tugas kita bersama, seluruh komponen masyarakat, terlebih penutur bahasa ibu/daerah masing-masing. Kalau pemilik bahasa ibu/daerah saja mengabaikan, jangan berharap orang lain mau mempedulikannya.

Sudah disebutkan bahwa penduduk Papua terdiri atas beratus-ratus suku bangsa yang menggunakan bahasa daerahnya masing-masing untuk berkomunikasi sehari-hari. Untuk berkomunikasi dengan suku lain, tentu saja diperlukan sebuah bahasa sebagai *lingua franca*, yakni bahasa Indonesia. Saat ini bahasa Indonesia sudah digunakan sampai ke pelosok Papua, termasuk ke kampung-kampung, baik oleh generasi muda (anak-anak dan remaja) maupun oleh generasi tua. Bahkan, saat ini penggunaan bahasa Indonesia diperkirakan semakin intensif masuk ke dalam kehidupan masyarakat Papua melalui berbagai media massa, baik media massa elektronik maupun media massa cetak.

Semakin intensifnya pemakaian bahasa Indonesia di berbagai ranah kehidupan oleh masyarakat Papua, di satu sisi dapat dipakai sebagai indikator keberhasilan pemasyarakatan bahasa Indonesia, tetapi di sisi lain dapat juga dipakai sebagai indikator melemahnya fungsi bahasa daerah/ibu di kalangan masyarakat Papua. Yang kita inginkan bersama tentu saja bukan hanya keberhasilan pemasyarakatan bahasa Indonesia, tetapi kita inginkan juga keberlangsungan bahasa daerah/ibu. Oleh karena itu, bagaimana upaya kita agar bahasa-bahasa yang hidup di masyarakat, apakah itu bahasa Indonesia, apakah itu bahasa daerah/ibu, atau apakah itu bahasa asing, dapat menempati fungsinya masing-masing. Dengan demikian, kita tidak akan merasa bahwa yang satu menggeser yang lain, tetapi semua hidup berdampingan, berbagi peran, dan menempati fungsinya masing-masing.

4. Masalah

Masalah yang kita hadapi bersama saat ini adalah kita tidak menyadari betapa pentingnya sebuah bahasa dalam suatu masyarakat. Kita juga belum dapat menempatkan bahasa-bahasa yang ada di dalam masyarakat pada peran dan fungsinya masing-masing.

Keadaan semacam ini memberi kesan bahwa bahasa A membunuh bahasa B, bahasa B menggeser bahasa C dan seterusnya. Memang, di dunia ini ada persaingan tentang hidup matinya sebuah bahasa. Hidup matinya sebuah bahasa bergantung pada pelbagai faktor, bukan hanya faktor intrabahasa, tetapi juga faktor ekstrasahasa. Banyak faktor ekstrasahasa yang dapat menjadi penghambat lancarnya komunikasi. Terhambatnya kelancaran komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat ini pada akhirnya akan menghambat pula lancarnya penerusan penggunaan bahasa daerah dari generasi ke generasi.

Adanya faktor penghambat penggunaan bahasa daerah dikhawatirkan akan mengancam keberadaannya, sedangkan adanya faktor penghambat penggunaan bahasa Indonesia dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Faktor ekstrasahasa yang sering menghambat penggunaan bahasa daerah adalah sikap pemilik bahasa itu sendiri. Nilai ekonomi dari bahasa itu juga dapat menjadi penghambat penggunaan bahasa daerah, begitu juga gengsi bahasa daerah tersebut.

5. Langkah-Langkah Strategis

Bahasa daerah Papua banyak jumlahnya, berbeda-beda jumlah penuturnya, dan berbeda-beda pula tingkat kestabilannya. Keadaan ini menuntut kita tidak sama memperlakukan dan menangani setiap bahasa tersebut. Kita mungkin tidak dapat menangani seluruh bahasa daerah yang ada di Papua secara bersamaan. Kita harus membuat prioritas penanganan, misalnya, bahasa yang masih banyak penuturnya, kita buat A, yang tinggal sedikit penuturnya kita buat B, dan hampir punah kita buat C. Dengan demikian, kita tidak kehilangan semuanya secara bersama-sama.

Pelestarian bahasa daerah/ibu dapat dilakukan melalui:

- inventarisasi
- dokumentasi
- penelitian/pengkajian

- pengembangan
- penyebarluasan

Bahasa-bahasa daerah di Papua ini mungkin saat ini sudah tidak lagi menjadi bahasa ibu, mungkin sudah digantikan oleh bahasa Indonesia. Jika keadaannya memang demikian, maka perlu dilakukan upaya-upaya agar bahasa daerah sebagai bahasa ibu tetap bertahan dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional, tetap berkembang.

Sementara itu, kita juga menyadari bahwa sebagian besar bahasa daerah di Indonesia masih menjadi bahasa ibu. Kita juga menyadari bahwa beberapa bahasa daerah yang jumlah penuturnya besar masih mampu menempati peran dan fungsinya di berbagai bidang, misalnya masih mampu sebagai bahasa pengantar pendidikan, masih mampu sebagai bahasa ilmu pengetahuan, dan masih mampu menampung ekspresi generasi mudanya sehingga masih digunakan secara meluas.

Sudah dikemukakan di depan bahwa sebagian besar bahasa daerah di Indonesia ini masih menjadi bahasa ibu, tetapi tidak semua bahasa itu mampu menjadi bahasa pengantar pendidikan, baik di lingkungan keluarga ataupun sebagai bahasa pengantar pembelajaran keaksaraan. Sepuluh bahasa besar yang ada di Indonesia, yakni bahasa: Aceh, Batak, Minang, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Banjar, Bugis, dan Sasak dapat menjadi bahasa pengantar pendidikan di keluarga, tetapi bahasa-bahasa lain akan terkendala oleh kemampuan daya ungkap, kekurangan kosakata dalam berbagai bidang ilmu yang telah menjadi cakupan kalangan generasi muda. Apalagi bahasa daerah yang berpenutur kecil, yang terancam kepunahan, tak mampu menjadi bahasa pengantar sekalipun berfungsi sebagai bahasa ibu di lingkungan keluarga penutur bahasa tersebut.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut.

- (1) pemertahanan dan penumbuhan sikap positif terhadap bahasa ibu/daerah dengan cara semacam kampanye atau gerakan bahwa bahasa daerah merupakan jati diri dan kebanggaan daerah. Sikap positif terhadap bahasa daerah sehingga bahasa daerah tersebut dapat bertahan telah ditunjukkan oleh bahasa Melayu Loloan di Bali (lihat Sumarsono 1993). Berdasarkan sensus penduduk 1980, jumlah penutur bahasa Melayu Loloan adalah 5.055 orang. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat tutur bahasa Bali yang jumlah penuturnya jauh lebih tinggi, tetapi mereka hingga kini masih menuturkan bahasa Melayu.
- (2) pengembangan kosakata dalam berbagai bidang ilmu bagi bahasa daerah yang memiliki potensi sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan keluarga dan pendidikan formal.
- (3) penghidupan kembali (revitalisasi) peran bahasa daerah dalam berbagai ranah penggunaan dalam masyarakat penuturnya.
- (4) penerusan penggunaan bahasa daerah itu kepada generasi pelapis agar tidak terjadi penurunan jumlah penutur ataupun kepunahan.
- (5) penelitian dan pendokumentasian bahasa daerah yang terancam punah. Penelitian dilakukan pada semua tataran bahasa, yakni fonologi/fonetik, morfologi, sintaksis, dan semantik. Jika penelitian tentang bahasa daerah ini sudah pernah ada, perlu diketahui tataran mana saja yang sudah diteliti, ditulis dalam bahasa apa, kalau ditulis dalam bahasa asing perlu segera diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari

sini dapat diketahui tataran mana saja yang belum diteliti dan untuk itu perlu dilengkapi penelitiannya. Penelitian-penelitian ini diarahkan untuk pembakuan tata bahasa dan kamus bahasa daerah. Kamus hendaknya dibuat dwibahasa, bahasa daerah–bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia–bahasa daerah, agar dapat digunakan secara luas.

- (6) Berdasarkan tata bahasa dan kamus baku ini disusun buku ajar. Buku ajar hendaknya menggunakan ancangan budaya (lihat Kridalaksana dkk. 2001; Puspitorini 1999). Oleh karena itu, topik-topik dalam buku ajar tersebut lebih banyak diisi dengan aspek-aspek budaya. Buku ajar ini seyogianya diajarkan kepada siswa, jika penutur (siswanya) homogen diajarkan sebagai bahasa ibu/pertama, jika penuturnya heterogen diajarkan sebagai bahasa kedua atau sebagai bahasa asing. Untuk menunjang buku ajar tersebut adalah penyediaan buku-buku teks atau cerita rakyat dalam bahasa daerah, baik untuk siswa maupun untuk masyarakat umum. Buku-buku teks atau cerita rakyat tersebut seyogianya berisi tentang uraian sejarah lokal, kearifan-kearifan lokal, dan keunikan-keunikan yang menjadi ciri dan kebanggaan daerah.
- (7) penginventarisasian dan penelitian dokumen bahasa-bahasa yang telah punah.
- (8) penyingkapan dan pembangkitan potensi bahasa daerah yang ada kemudian dimekarkan secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk menopang pembangunan kebudayaan.
- (9) pembalikan pergeseran bahasa terhadap bahasa ibu/daerah yang telah mengalami pergeseran.

Langkah-langkah itu harus didukung oleh semua pihak, baik Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, maupun masyarakat.

6. Kendala-Kendala yang Dihadapi

Langkah-langkah strategis yang dikemukakan di atas mungkin ada yang dapat langsung kita kerjakan orang per orang penutur bahasa ibu masing-masing, tetapi tidak sedikit yang harus dikerjakan bersama-sama. Untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama diperlukan koordinasi yang baik antara unsur-unsur yang terlibat. Namun, kenyataan yang ada kita jarang dapat melakukan koordinasi, inilah kendala utama yang selama ini kita temui.

Seandainya kita telah dapat memasukkan bahasa ibu/daerah ke dalam dunia pendidikan formal, tidak serta-merta dapat dikerjakan. Kita masih harus bekerja keras untuk mempersiapkan semua perangkat pendukungnya. Kendala yang mungkin akan kita hadapi, seandainya semua perangkat yang diperlukan untuk sarana belajar-mengajar telah tersedia, adalah tenaga pengajarnya. Kita mungkin akan kesulitan mencari pengajar bahasa daerah/ibu yang jumlahnya tentu saja tidak sedikit dan tentu saja juga yang dapat memenuhi standar yang ditentukan.

7. Simpulan

Bahasa ibu/daerah yang masih hidup dan berkembang baik tetap digunakan sebagai sarana komunikasi di daerah di antara sesama warga pemakai bahasa ibu/daerah itu.

Dengan kata lain, bahasa ibu/daerah yang masih hidup itu dipakai sesuai dengan peran dan fungsinya.

Bahasa ibu/daerah masih dapat tetap digunakan dalam ranah yang berkaitan dengan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan lokal, dan keagamaan sebagai penopang kekayaan budaya daerah.

Perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan sikap positif terhadap bahasa ibu/daerah bahwa bahasa ibu/daerah merupakan kebanggaan dan jati diri daerah.

Bahasa ibu/daerah sebaiknya tetap digunakan di dalam ranah keluarga. Pertuturan antarsesama anggota keluarga seyogianya juga digunakan bahasa ibu/daerah yang memang telah menjadi miliknya, yang diwariskan secara turun-temurun, yang diteruskan dari generasi ke generasi. Menurut para ahli sosiolinguistik (Gunarwan 1994), penggunaan bahasa di dalam ranah keluarga adalah benteng terakhir pemertahanan sebuah bahasa.

Untuk menjadikan bahasa ibu/daerah sebagai bahasa pengantar pendidikan formal tidak mudah, perlu ada koordinasi yang baik antara unsur-unsur yang terkait, dan mungkin akan ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

8. Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. 2000. "Pelestarian Bahasa Daerah," dalam Hasan Alwi, dkk. (Penyunting). *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi*. 2000. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Hlm.67.
- Alwi, Hasan, dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga, Cetakan ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah*.
- Gunarwan, Asim. 1994. "The Encroachment of Indonesian upon the Home Domain of Lampung Language Use. A Study of the Possibility of a Minor Language Shift." Paper at Seventh International Conference on Austronesia Linguistics Leiden University, 22–27 August.
- Kridalaksana, Harimurti, dkk. 2001. *Wiwara, Pengantar Bahasa dan Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik*. Edisi keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Puspitorini, Dwi. 1999. "Pengajaran Keterampilan Berbahasa Jawa," dalam F.X. Rahyono, dkk. (Penyunting). *Kibas Unggas Budaya Jawa*. 1999. Depok: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Hlm. 308–337.
- Sekretariat Daerah Provinsi Papua. 2001. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.

- Silzer, Peter J. dkk. 1986. *Peta Lokasi Bahasa-Bahasa Daerah di Propinsi Irian Jaya*. Jayapura: Universitas Cenderawasih dan Summer Institute of Linguistic.
- Sumarsono. 1993. *Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan di Bali*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sumarsono dan Paina Partana. 2002. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: SABDA dan Pustaka Pelajar.
- Tucker, Irene, dkk. 2000. *Languages of Indonesia*. Jakarta: SIL International, Indonesia Branch.
- Tachier, A. 1991. *Bahasa-Bahasa Suku Bangsa di Irian Jaya*. Jayapura: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Irian Jaya.